

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KOMPETENSI STAF
AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember)**

Indah Aprihani

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dan secara bersama-sama mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Jember. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan jumlah responden sebanyak 118 orang. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 2) sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 3) kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Staf Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan semakin hangat diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintahan sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini *disclaimer* di beberapa instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Opini *disclaimer* diberikan terhadap laporan keuangan karena Badan Pengawas Keuangan mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan, penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang belum memadai dan kurangnya kompetensi staf akuntansi yang ada.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Melalui penguatan sistem pengendalian internal, diharapkan upaya perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih dipacu agar kedepannya dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Sebab laporan keuangan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian berarti laporan tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengambil keputusan oleh para pemakai laporan keuangan. Selain itu penerapan sistem

pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian Negara.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau existensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut.

Fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) tahun anggaran 2014, Kabupaten Jember mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Badan Pengawas Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena terdapat beberapa alasan, diantaranya adalah soal pengelolaan aset pemerintah daerah terutama yang dikelola oleh Dinas Pendidikan (Sumber: IHPS 1 Tahun 2015). Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah cukup baik, namun perlu adanya upaya perbaikan yang diharapkan kedepannya bisa ditingkatkan lagi melalui pembenahan dan pembinaan di beberapa

aspek seperti meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah mengenai pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Belum tertibnya pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh masih terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai dan memahami tentang ilmu akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, unsur pemahaman akuntansi berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Nasrudin (2008), sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) , maka perlu diperhatikan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, seperti pemahaman akan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini diperlukan agar hasil laporan keuangan daerah lebih berkualitas (relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan). Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan meneliti hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember)”**.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

TELAAH PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yaitu SAP diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern

Xu, *et al.* (2003) menjelaskan bahwa interaksi antara orang dan system serta implementasi sistem merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas dari sebuah informasi. Keandalan sistem harus juga didukung oleh keandalan sumber daya manusia. Namun sistem yang sudah berjalan harus dikontrol agar tetap dapat berjalan baik. Tahun 1994 *Committee of American institute of Accountants* (sekarang bernama *The American Institue Of Certified Publik Accountant Atau AICPA*) mendefinisikan pengertian pengendalian intern sebagaimana dikutip oleh Bastian (2009: 51) pengendalian intern rencana organisasi dan semua metode serta ketentuan yang terkoordinasi yang dianut perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek

kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong diataatinnya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Kompetensi Staf Akuntansi

Sumber daya manusia (*human resources*) merupakan orang-orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Simamora, 2011). Menurut Amirudin (2009), kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislative dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam pengelolaan keuangan daerah. Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Kualitas Laporan Keuangan

Suatu laporan keuangan dapat memberikan manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2005: KK-10) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran- ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dihendaki yaitu relevan, andal,netral, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Penelitian Terdahulu

Purwanti Nugraheni (2008) dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” dimana hasil penelitiannya membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun menurut penelitian Emilda Ihsanti dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota)” dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi SDM mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penerapan standar akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut penelitian Akhmad Syarifudin (2014) dengan judul “ Pengaruh Kompetensi SDM Dan Peran Audit Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kebumen)” dimana hasil penelitiannya Kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD, Peran Auditor Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD, SPIP berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD, Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap SPIP, sehingga tinggi tingkat kompetensi akan semakin meningkatkan efektifitas SPIP, Peran Audit Intern berpengaruh signifikan terhadap SPIP sehingga semakin baik Peran Audit Intern maka penerapan SPIP semakin efektif, SPIP dapat memediasi pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas LKPD, SPIP tidak memediasi pengaruh Peran Audit Intern terhadap Kualitas LKPD.

Anggraeni S. Madjham, Sahmin Noholo dan Lukman Pakaya dengan judul penelitian “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara) “dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Namun menurut penelitian Aristanti Widyaningsih (2015) dengan judul

“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan” dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian dan pemantauan dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Sedangkan dimensi lain, yaitu penilaian risiko, informasi dan komunikasi tidak signifikan.

Kartika Indria (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akutabilitas Keuangan” dimana hasil penelitiannya membuktikan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.

Zuliarti (2012) dengan judul “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan.

Indriasari dan Kurnia famela (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung, membuktikan bahwa kompetensi pegawai dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di kota Bandung. Ruri Windiastuti (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, dimana hasil penelitiannya membuktikan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal signifikan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel dependen yaitu kualitas informasi laporan keuangan dengan variabel independen yaitu standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi.

1. Hubungan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Emilda Ihsanti (2014) menemukan tidak ada pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Tetapi Purwati Nugraheni dan Imam Subaweh (2008) melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh pengelolaan UAPPA EI dan UAPPB dalam penerapan sistem akuntansi pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi di Inspektorat Jendral, Pengatahuan pengelolaan UAPPA EI dan UAPPB, serta ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pada tingkat sedang.

Dalam penelitiannya, Wayan Kusuma Wiraputra, Ni Kadek Sinarwati dan Nyoman Trisna Herawati (2014) mencoba untuk mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah dan pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Adanya pengaruh positif dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

2. Hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Melalui penguatan sistem pengendalian internal, diharapkan upaya perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih dipacu agar kedepannya dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Sebab laporan keuangan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian berarti laporan tersebut dapat dipercaya sebagai alat penambil keputusan oleh para pemakai laporan keuangan. Selain itu penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian neraca.

Anggraeni S. Madjham, Sahmin Noholo dan Lukman Pakaya (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Pengendalian intern pemerintah merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan

dan pendeteksian pengelapan serta melindungi sumber daya organisasi. Dan Zuliarti (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern akuntansi mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan.

Dalam penelitian Aristanti Widyaningsih (2015) mencoba untuk meneliti penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas akuntabilitas keuangan. Sistem pengendalian internal yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian dan pemantauan dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Sedangkan dimensi lain, yaitu penilaian risiko, informasi dan komunikasi tidak signifikan. Temuan penelitian ini menginformasikan bahwa sistem pengendalian intern yang berjalan efektif akan meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas mengenai sistem pengendalian internal maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Adanya pengaruh positif dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

3. Hubungan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan, selain diperlukan penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal yang baik tentunya dalam menyusun laporan keuangan diperlukan kompetensi yang baik dari staf akuntansi. Zuliarti (2012) menemukan tidak ada pengaruh signifikan antara kapasitas SDM terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Ketidaksignifikanan ini mungkin

disebabkan kondisi kapasitas SDM di subbagian akuntansi/ tata usaha keuangan yang belum mendukung baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Namun penelitian Indriasari dan Kurnia Famela (2013) kompetensi pegawai mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam penelitian Emilda Ihsanti (2014) mencoba untuk meneliti pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi SDM mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam artian, SDM keuangan/ Akuntansi tersebut kompeten, maka kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan lebih baik. Ini juga disertai dengan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh responden dalam membuat laporan keuangan. Selain itu pengalaman kerja, kemampuan kerja dan pelatihan yang dimiliki oleh seorang pegawai bisa mempengaruhi kualitas SDM.

Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui kinerja atau existensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas mengenai kompetensi staf akuntansi maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Adanya pengaruh positif dari Kompetensi Staf Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diambil langsung dari sumbernya yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Teknik Pengambilan Sampel

Pemilihan Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel sengaja di pilih berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan oleh peneliti.

Uji Indkator Penelitian

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran dan deskripsi mengenai variabel – variabel dalam penelitian. Menurut Indriantoro dan Supomo (2007), statistik dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diintrestasikan.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner sebagai instrument penelitian dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut (Ghozali, 2005). Instrument penelitian juga dapat dinyatakan valid apabila mempunyai nilai r hitung lebih besar dari r table pada taraf signifikan 5%. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS for windows versi 20.0.

Uji Reliabilita

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011:41). Pengukuran reliabilitas dapat

dilakukan dengan one shot atau pengukuran sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau pengukuran korelasi antar jawaban pertanyaan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji Normalitas Data dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu (residual) memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2005). Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Dimana dalam penelitian ini digunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* yang dilakukan dengan bantuan *software* SPSS 20.0. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan signifikan hasil pengujian dengan tingkat signifikan 0,05. Nilai signifikan dari Uji Normalitas ini harus lebih besar daripada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal, dan jika nilai signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2006:911). Model regresi yang baik seharusnya adalah yang tidak terjadi korelasi di antara variabel-variabel bebas. Cara untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan cara melihat table VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai VIF lebih dari 10 maka ada indikasi adanya multikolinieritas yang sebenarnya perlu dihindari.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residu satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastis dan jika berbeda disebut heteroskedastis.

Teknik Analisi Data

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Bentuk umum perumusan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi/ R^2 digunakan untuk mengetahui hubungan antara semua variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar persentase variasi dalam dependen variabel yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam independen variabel. Nilai R^2 terletak antara 0 (nol) dan 1 (satu), jika R^2 semakin mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam dependen variabel yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam independen variabel, ini berarti semakin tepat garis regresi tersebut untuk mewakili hasil observasi yang sebenarnya (Ghozali, 2011).

Uji Regresi Secara Simultan/Bersama-sama (F test)

Uji F adalah uji kelayakan model yang harus dilakukan dalam analisis regresi linear. Jika uji F tidak signifikan maka tidak disarankan untuk melakukan uji t atau uji persial. Uji dilakukan dengan menggunakan Tabel Anova yang bertujuan untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05. Ketentuan yang digunakan adalah (berdasarkan probabilitas).

Pengujian Hipotesis

Uji Parameter Individual (Uji T)

Uji T merupakan pengujian yang digunakan untuk melihat apakah terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Dengan artian apabila nilai signifikansi lebih rendah atau kecil dari 0,05 maka hipotesis alternative akan diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji indikator

Uji Validitas

Dapat diketahui bahwa masing-masing indikator yang digunakan baik dalam variabel independen (penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi) maupun variabel dependen (kualitas laporan keuangan) mempunyai nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Hal ini menggambarkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator variabel independen (penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi) maupun variabel dependen (kualitas laporan keuangan) mempunyai skor total di atas r tabel (0,18). Maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan valid.

Uji Reliabilitas

Diketahui bahwa koefisien *Cronbach Alpha* (α) untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan memiliki nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$. Dengan demikian seluruh indikator pertanyaan dari ke empat variabel dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil analisis *collinearity Statistic* diketahui bahwa hasil perhitungan *tolerance* pada tabel 4.5 tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, dimana nilai VIF dari masing-masing variabel kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Pada uji heteroskedastisitas terdapat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi,

Uji Normalitas

Pada uji normalitas terdapat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Teknik Analisi Data

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasar hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 11,105, artinya jika Penerapan Standar Pemerintahan (X_1), Sistem Pengendalian Internal (X_2) dan Kompetensi Staf Akuntansi (X_3) nilainya adalah nol. Dalam hal ini kualitas laporan keuangan akan mengalami penurunan tanpa ketiga variabel tersebut yang disebabkan oleh factor lain. Nilai koefisien b_1 0,137, artinya variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan meningkat sebesar satu satuan dan variabel lain konstan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meningkat sebesar 0,137 satuan dan sebaliknya jika penerapan standar akuntansi pemerintahan menurun sebesar satu satuan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan menurun sebesar 0,137. Nilai koefisien b_2 0,233, artinya apabila sistem pengendalian internal meningkat sebesar satu satuan dan variabel lain konstan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meningkat sebesar 0,233 satuan dan sebaliknya jika sistem pengendalian internal menurun sebesar satu satuan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan menurun sebesar 0,233. Nilai koefisien b_3 0,442 apabila kompetensi staf akuntansi meningkat sebesar satu satuan dan variabel lain konstan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meningkat sebesar 0,442 satuan dan sebaliknya jika kompetensi staf akuntansi

menurun sebesar satu satuan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan menurun sebesar 0,442.

Pengujian Hipotesis

Uji Parameter Individual (Uji T)

Berdasarkan hasil analisis uji t dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai t sebesar 2,680 dan signifikansi $< \alpha$ yaitu $0,009 < 0,05$. Yang artinya H_1 terdukung. Sehingga dapat diartikan Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai t sebesar 2,104 dengan probabilitas signifikan sebesar $0,038 < 0,05$ yang artinya H_2 Terdukung. Sehingga dapat diartikan bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Variabel Kompetensi Staf Akuntansi memiliki nilai t sebesar 5,249 dengan probabilitas signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya H_3 terdukung. Sehingga dapat diartikan bahwa Kompetensi Staf Akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

PEMBAHASAN HIPOTESIS

H_1 : Semakin tinggi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan maka akan semakin tinggi tingkat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sesuai yang tertera dalam hipotesis pertama, semakin tinggi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan maka akan semakin tinggi tingkat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil uji t menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan dibawah batas yang ditoleransi ($0,009 < 0,05$).

H_2 : Semakin tinggi Sistem Pengendalian Internal maka akan semakin tinggi tingkat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sesuai yang tertera dalam hipotesis kedua, semakin tinggi Sistem Pengendalian Internal maka akan semakin tinggi tingkat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah. Hasil uji t menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan dibawah batas yang ditoleransi ($0,038 < 0,05$).

H₃ : Semakin tinggi Kompetensi Staf Akuntansi maka akan semakin tinggi tingkat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sesuai yang tertera dalam hipotesis ketiga, semakin tinggi kompetensi staf akuntansi maka akan semakin tinggi tingkat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil uji t menunjukkan bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan dibawah batas yang ditoleransi ($0,000 < 0,05$).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Jember.
2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian internal, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Jember.
3. Kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kompetensi staf akuntansi, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Jember.

Saran

Mengacu pada hasil kesimpulan dan pembahasan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. oleh karena itu, hendaknya pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember selalu memperhatikan faktor-faktor tersebut, seperti mengikut sertakan pegawai pada pendidikan dan pelatihan mengenai bagaimana penyusunan laporan keuangan yang berlaku umum, serta peningkatan sistem pengendalian internal.
2. Sebagai acuan penelitian yang akan datang, agar meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat dibandingkan dengan hasil penelitian penulis. Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Jember, disarankan agar peneliti selanjutnya memperluas atau memperbanyak responden atau objek yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kharis. 2010, *Pengaruh Kualitas Sumber Daya manusia Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada PT. Avia Avian*, Skripsi UPN Veteran, Jawa Timur.
- Akhmad Syarifudin. 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen)*. Jurnal Fokus Bisnis No. 02 Volume 14.
- Anggraeni S. Madjham, Sahmin Noholo, dan Lukman Pakaya. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (studi kasus pada DPPKAD kabupaten gorontalo utara)*. Progrm Studi SI Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.
- Aristanti Widyaningsih. 2015. *Pengaruh Sistem Pengendalian Inttern Terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan*. Fakultas Ekonomi No. 2 Vol.10.

- Azhar. 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri No. 13 Pada Pemerintah Kota Banda Aceh*. Tesis Sekolah Pascasarjana USU, Medan.
- Bastian Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. BPFE. Yogyakarta.
- Badan Pemeriksaan Keuangan RI, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015*, <http://www.bpk.go.id>, 16 April 2016.
- Desiana. 2012. *Pengaruh Dukungan Pimpinan dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Informasi Keuangan Daerah*. Skripsi (dipublikasikan). Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.
- Emilda Ihsanti. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota)*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Famela Ika Kurnia. 2013. *Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kota Bandung*. Skripsi (hasil penelitian tidak dipublikasikan). Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP.
- Hafiz, Tanjung Abdul. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Daerah: Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: ALFABETA.
- Indriasari, Nahartyo. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kartika Indriya. 2013. *Pengaruh Sistem Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Penelitian pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat)*. Skripsi (hasil penelitian tidak dipublikasikan). Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Martoyo, Susilo. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Purwanti Nugraheni, imam. 2008. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1 Vol. 13.
- Ricky Nurdiansyah. 2015. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo)*. Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember.
- Ruri Windiastuti. 2013. *Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Siagian P. Sondang. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edi. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Wahyono, Teguh. 2005. *Sistem Informasi Akuntansi: Analisis, Desain dan Pemograman Komputer*. Yogyakarta: Andi.
- Warisno. 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Longkungan Pemerintah Provinsi Jambi*, Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan.
- Wayan Kusuma Wiraputra, Ni Kadek Sinarwati dan Trisna Herawati. 2014. *Penagruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penyusunan Dan Penyajian Laporan*

Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung). Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.

Wirawan, Nata. 2002. ***Statistik 2 (Statistik Inferensia) untuk Ekonomi dan Bisnis : Edisi Kedua***. Bali : Keraras Emas

www.bpk.go.id

www.jemberkab.go.id

Xu, Hongjiang, Jeretta H.N., G. Daryl Nord, Binshan Lin. 2003. “***Key issue of accounting information quality management : Australian case studies***”. *Industrial Management & Data System* 103/7, 461- 470

Zuliarti. 2012. ***Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus)***. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.